

PERTANGGUNGJAWABAN – APBD
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NO. 1 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 1, 7 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2014 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten rembang TA 2014 yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 14 Juli 2015
- Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.